

Kekuatan Militer RI Naik Kelas, Kini Tempati Ranking 13 Dunia

JAKARTA (IM) - Kekuatan militer Republik Indonesia (RI) terus melesat naik. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Global Firepower (GFP) lewat website resminya, kekuatan militer Indonesia 2023 menduduki posisi ke-13 dunia dengan indeks kekuatan 0,2221.

Peringkat Indonesia ini lebih baik dibandingkan 2022 yang berada pada posisi 15 dengan indeks kekuatan 0,2251. Pada tahun lalu, Indonesia berhasil mendepak kekuatan militer Jerman ke posisi 16.

Kini ranking kekuatan militer Jerman pun

terus melorot ke posisi 25 dunia. Sementara itu, Amerika Serikat masih dinilai sebagai negara dengan kekuatan militer paling tangguh di posisi 1 dunia. Posisi Amerika Serikat dibuntuti oleh kekuatan militer Rusia di ranking 2 dan militer China di ranking 3 dunia.

Ada 60 faktor yang digunakan untuk menentukan skor pada indeks kekuatan (Power Indeks). Kategori yang dinilai antara lain jumlah unit militer serta kemampuan keuangan negara hingga kekuatan logistik dan kondisi geografi suatu negara. ● han

Jenderal Dudung Bangga terhadap Pratu Ronald yang Ikut Seleksi MMA

JAKARTA (IM) - Pratu Ronald Siahaan mengukir prestasi membanggakan. Prajurit dari Yonharud 1/PBC/1 Kostrad ini menjadi wakil Indonesia untuk seleksi MMA Fight Academy II di San Diego Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari hingga 20 Februari 2023.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang menerima kedatangan Pratu Ronald Siahaan di Mabesad, Kamis 5 Januari 2023, mengaku sangat bangga.

Ia pun berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pratu Ronald Siahaan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.

"Dan tetap selalu menjaga diri serta nama baik TNI AD, bangsa dan negara

selama mengikuti seleksi tersebut," pesan KSAD.

Untuk diketahui, Pratu Ronald Siahaan adalah fighter berjudul Naga Sakti asal Sumatera Utara ini telah berhasil meraih prestasi sebagai peraih medali perak pada cabang olahraga Kickboxing di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar tahun 2022, serta menciptakan rekor tujuh kali kemenangan berturut-turut di kelas terbang OnePride MMA.

Selanjutnya ketika seleksi MMA Fight Academy tahap I di Bali (Desember 2022) yang diikuti oleh 50 atlet dari 5 negara (Rusia, India, Jepang, Tajikistan dan Indonesia), Ronald menjadi salah satu fighter dari 13 personel yang dinyatakan berhasil mengikuti tahap berikutnya di Amerika. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PBNU LUNCURKAN MARS SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri) dan Wasekjen Rahmat Hidayat Pulungan (kanan) memberikan keterangan pers peluncuran Mars Satu Abad NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat (6/1). PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati.

Bendera Partai Ummat Dibentangkan di Masjid, PBNU: *Harus Ada Sanksi Jelas*

Bawaslu harusnya memberi sanksi yang jelas kepada setiap partai politik yang menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Sebab UU melarangnya.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai, pembentangan bendera Partai Ummat di Masjid Attaqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat tak pantas.

"Tolonglah hormati masjid. Masjid itu untuk semua umat. Tidak ada masjid untuk partai politik," kata Yahya saat ditemui wartawan di Kantor

PBNU, Jakarta, Jumat (6/1). Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas terhadap aksi pembentangan bendera partai politik di Masjid Attaqwa, Kota Cirebon.

Penindakan yang tegas atas pelanggaran seperti itu merupakan salah satu bentuk penegakan larangan peng-

gunaan rumah ibadah untuk berkampanye seperti dimuat dalam UU Pemilu.

"Pertama-tama *enforcement*-nya (penindakan) harus jelas," ujar Yahya.

"Kalau ada yang melakukan (pemakaian rumah ibadah untuk kepentingan politik praktis) ya harus ada sanksi yang jelas. Ada *enforcement*-lah. Jangan cuma tinggal jadi aturan/catatan saja," katanya.

Setelah menerima kunjungan komisioner KPU RI pada Rabu (4/1), Yahya mengungkapkan kegelisahannya soal kemungkinan digunakannya tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis, khususnya kampanye peserta pemilu.

Diperkirakan 21 orang terlibat dalam aksi pembentangan bendera Partai Ummat di di Masjid Attaqwa, Kota Cirebon, di mana 17 orang di antaranya pria dan 4 lainnya wanita.

Bawaslu RI mengaku telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Cirebon untuk memeriksa insiden tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin mengaku, berdasarkan jawaban dari pihak Partai Ummat, kegiatan tersebut terjadi pada 1 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB. Sekitar membentangkan dua bendera Partai Ummat di Masjid itu sebagai ungkapan rasa bahagia setelah dinyatakan lolos verifikasi menjadi partai peserta Pemilu 2024.

"Intinya, dari penjelasan mereka, bahwa mereka menyampaikan kegiatan itu sebagai bentuk syukur. Setelah itu ada dua orang yang membawa bendera, yang semula diikatkan, lalu dibentangkan," kata Joharudin.

Kepada Joharudin, pihak pengurus Partai Ummat menyebut, kegiatan itu hanya untuk konsumsi internal. Partai Ummat Kota Cirebon juga mengakui bahwa mereka tidak membuat surat izin kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kegiatan

tersebut.

Johar menegaskan, Partai Ummat Kota Cirebon melanggar etika politik, karena telah membentangkan bendera partai di dalam tempat ibadah, dalam hal ini masjid.

"Saat ini masih di luar tahapan kampanye, kami belum bisa menerapkan undang-undang larangan atau pelanggaran karena belum masuk tahapan. Tapi, Partai Ummat melanggar etika politik. Partai politik wajib menjaga etika, keutuhan, kondusifitas yang diatur undang-undang," ujar Joharudin.

Bawaslu Kota Cirebon juga mengaku telah menegur dan memperingati Partai Ummat Kota Cirebon agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Meski demikian, Bawaslu masih melakukan pemeriksaan bertahap kepada beberapa pihak atas kejadian ini.

Sementara itu, DPD Partai Ummat Kota Cirebon Jawa Barat, menyampaikan permohonan maaf telah membuat ramai. Mereka tidak menyangka, peristiwa spontanitas membentangkan bendera di dalam masjid pascasujud syukur, menjadi viral.

Mereka juga meluruskan tuduhan bahwa Partai Ummat melakukan kampanye di dalam masjid. ● han

Periksa Bupati dan Wabup Morowali Utara, KPK Sita Uang Sebanyak Rp8 Miliar

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Delis Julkarson Hehi dan Wakilnya, Djira Kendjo, pada Kamis (5/1).

Di hari yang sama, KPK juga telah memeriksa Kepala BPKAD Morowali Utara, Masjudin Sudin. Ketiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Bersamaan dengan itu, penyidik KPK menyita uang sebanyak Rp8 miliar yang diduga berkaitan dengan korupsi pembangunan kantor DPRD Morowali Utara.

Uang Rp8 miliar tersebut diduga berasal dari setoran pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara korupsi pembangunan kantor DPRD Morowali Utara. Uang tersebut masuk ke dalam kas Penda Morowali Utara. Oleh karenanya, KPK melakukan penyitaan lewat ketiga saksi tersebut.

"Ketiga saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan masuknya uang senilai Rp8

miliar ke kas daerah Penda Morowali Utara dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini. Saat ini, uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (6/1).

Sebelumnya, KPK menginformasikan sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kasus tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan.

"KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Pemkab Morowali Utara, Sulawesi Tengah," kata Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin, 21 November 2022 lalu.

Pengusutan kasus ini merupakan hasil koordinasi supervisi KPK dengan Polda Sulawesi Tengah. Mulanya, kasus ini ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah, hingga akhirnya diambil alih oleh KPK.

Saat ini, KPK masih

mengumpulkan bukti tambahan dalam proses penyidikan.

KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Kendati demikian, KPK belum mengungkap secara detil siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016 tersebut telah merugikan negara sekira Rp8 miliar.

Pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara ini awalnya dikerjakan oleh perusahaan konstruksi MGK. Adapun, nilai kontrak untuk proyek ini setelah terdapat perubahan (addendum) sebesar Rp9.004.617.000 (Rp9 miliar).

Kemudian, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp8.002.327.333 (Rp8 miliar). ● han



FOTO: ANI

PAPARAN OUTLOOK ICW 2023

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sumaryanto memberikan paparannya saat Peluncuran Outlook ICW 2023 di Jakarta, Jumat (6/1). Outlook ICW 2023 tersebut mengambil tema "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi: Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi".

KPK Cek Aset Lukas Enembe yang Diduga Hasil Korupsi

JAKARTA (IM) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak ke beberapa tempat untuk memeriksa sejumlah aset Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga didapat dari korupsi.

"Saat ini tim bergerak ke beberapa tempat untuk mengecek aset dari saudara LE, tentu yang berkaitan dengan tipikor yang dilakukannya," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, saat konferensi pers, Kamis (5/1) malam.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami aset Lukas Enembe. Saksi-saksi yang diperiksa antara lain Winda Subastian selaku Property Manager The Capital Residence dan Ratih Desyani selaku Human Resource Manager The Capital Residence.

Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, pada 15 Desember 2022. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi lain yang terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua maupun dari pihak swasta, di antaranya pemilik PT Bangun Papua (TBP), sekaligus Direktur Tabi Maju Makmur bernama Bonny Pirono.

Kemudian, Bendahara PT TBP Meike, Pegawai PT TBP Willicius, Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Entrop Hamadi bernama Okto Prasetyo, Gangsar

Cahyono, Arni parire, Paskalina, dan Yenni Pigome. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Entrop Hamadi, Giriur One Yoman, dan Direktur PT Papua Sinar Anugerah KSO PT Tabi Bangun Papua, Sumantri.

Lukas Enembe merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dugaan kasus korupsi Lukas Enembe terkuak, setelah KPK menerima laporan dari masyarakat. Aduan masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti. Setelah ditemukan alat bukti yang cukup, KPK menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan.

Alexander Marwata mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini. "Saudara Lukas Enembe ini Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023," kata Alex di Gedung KPK, Kamis (5/1).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua. ● mei



FOTO: ANI

PEMERIKSAAN TERSANGKA ILHAM WAHYUDI

Tersangka Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng. (tengah) berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/1). Ilham Wahyudi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur.

KPK: Harun Masiku Ada di Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut bahwa mantan calon anggota legislatif (calleg) dari PDI Perjuangan, Harun Masiku berada di luar negeri.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.

"Ada di luar negeri. Jadi, kami masih koordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Jumat (6/1).

Sayangnya, Asep tidak menjelaskan saat ini Harun bersembunyi di negara mana. Hanya saja dipastikannya bahwa yang bersangkutan ada di luar negeri berdasarkan informasi yang mereka dapat.

"Informasi yang kami terima begitu," ujar Asep menambahkan.

Sebelumnya, KPK juga telah memroses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.

Bahkan, salah seorang kader PDI Perjuangan Bernama Agustiani Tio Fridelina, telah divonis empat tahun penjara.

Hakim menyebut Tio Fridelina terbukti bersalah ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.

Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau

seluruhnya Rp600 juta dari Harun.

Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.

Selain Harun Masiku, KPK juga mencatat ada empat tersangka lain masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa kasus sampai saat ini.

Pertama, Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) untuk pengadaan Kapal SSV bagi Pemerintah Filipina tahun 2014-2017.

Kedua, Izil Azhar dalam perkara bersama Irwandi Yusuf, selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, terkait menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ketiga adalah Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).

Keempat, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terkait perkara dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. ● han